



FUNGSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BATANGAN PATI DALAM USAHA PERIKANAN

Enggar Ahmadi Sistian*, Amiek Soemarmi, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : enggarass@gmail.com

ABSTRAK

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di lihat dari jumlah kapal, nelayan, hasil perikanan, masyarakat sekitar dan akses yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai potensi bahari yang sangat signifikan, maka pembangunan Pati perlu memperhitungkan potensi itu. Pengembangan perikanan laut ini ditempuh melalui beberapa aspek seperti peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan, mengetahui kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan.

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif diskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan penggerak utama perekonomian yang membawa angin perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan daerah serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang terwujud dalam kebijakan sektoral termasuk sektor kalautan dan perikanan. 2). Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun dalam usaha perikanan telah mencukupi standar operasional. Namun pemerintah Kabupaten Pati masih terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan pengolahan perikanan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar.

Menyikapi dari hasil pembahasan, saran yang diberikan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati masih perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengembmbangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati.

Kata Kunci : Pangkalan Pendaratan Ikan, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati has a huge potential to be developed in view of the number of vessels, fishermen, fisheries, local communities and access to adequate. Pati Regency Government has a very significant maritime potential, the development Pati need to take into account that potential. Development of marine fisheries is achieved through several aspects such as the improvement of human resources engaged in the fisheries sector. This study aims to determine how the role of the Government in the conduct of the affairs Pati fisheries, knowing the condition of facilities and infrastructure of Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati starch in meeting the needs of fishermen and fishing businesses.



This research was conducted at the Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. The method used in this research is normative juridical. The data used is secondary data is data obtained directly from the field using interviews, and secondary data in the form of a literature study. Analysis of the data used is qualitative descriptive in the withdrawal of deductive conclusions.

The results obtained: 1). Government Pati regency in the conduct of the affairs of fisheries, especially the port as an effort of regional autonomy able to put marine and fisheries sector as the leading sector and a major driver of the economy which brought winds of fundamental changes to the structure of local government and authorities in the management of the resources embodied in the sectoral policies including the maritime sector and fishery. 2). Conditions infrastructure Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) in meeting the need of fishermen and the fishing effort has sufficient operational standards. However, Pati regency government continues its efforts in the improvement of infrastructure and development of fish processing. Efforts are made to improve the economic welfare of the surrounding community.

Responding to the results of the discussion, the advice given is the Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati still need to improve the capacity of services to service users and mengembangkan Fish Landing Base (PPI) bars.

Keywords : *Pangkalan Pendaratan Ikan, Local Government*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dilihat dari geografis merupakan Negara dengan prosentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang tergusur pulau-pulau besar dan kecil. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.510 pulau.¹ Panjang garis pantai mencapai 95.181 km serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 41 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. Pada Ayat (2)

disebutkan bahwa Menteri menetapkan: a) rencana induk pelabuhan perikanan secara Nasional, b) klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, c) persyaratan dan atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan, d) wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan dan e) pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. Kabupaten Pati terletak pada posisi 6°25' – 70 LS dan 110° – 111° BT berhadapan langsung dengan laut Jawa dengan luas wilayah 1.491,13

¹sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, *Loka Karya Nasional Pengolahan Jasa*

Kelautan dan Kemaritiman, (Jakarta:Hotel Bumi Karsa Bidakara, 19 Juni 2007), hlm.1.



km² dan memiliki garis pantai sepanjang 60 km.²

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan ini telah berfungsi cukup baik tapi masih ada beberapa kendala yang ditemui dalam operasional pelabuhan tersebut. Masalahnya adalah fasilitas yang ada sekarang belum mengalami perubahan yang signifikan dan juga menghambat laju usaha perikanan dan juga banyak kapal yang jarang membongkar muat di pelabuhan tersebut dikarenakan pelabuhan yang tidak bisa menampung jumlah kapal yang datang. Dengan adanya pengembangan di bidang kelautan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dalam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan segera terwujud.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah tugas pokok adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau kecil di Kabupaten Pati ini disebutkan bahwa Kabupaten Pati memiliki potensi besar dalam bidang

kelautan yang perlu dikelola dengan baik guna menungjung aktivitas usaha perikanan para nelayan dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Secara umum fungsi Pelabuhan Perikanan tertuang pada Undang-Undang No.45 Tahun 2009 pasal 41A ayat (1) tentang Perikanan yang berbunyi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.. Disamping peranan dan fungsinya, PPI Batangan juga memiliki tugas sebagai sentra pengembangan ekonomi pesisir yang mana juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dampak nyata dari kehadiran Pelabuhan Perikanan Pantai ini sangat berkontribusi terhadap usaha perikanan pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan urusan perikanan di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana Pangkalan

²Jawa Tengah dalam Angka (Semarang: Dinas Perikanan Provinsi dan 1 Jawa Tengah, 1991), hlm. 49.



Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan urusan perikanan di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam usaha perikanan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Pengertian penelitian hukum yang yuridis yaitu bahwa dalam meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dari berbagai regulasi hukum nasional yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun

secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 110°50' – 111°15' BT dan 6°25' – 7° LS. Dengan batas wilayah sebelah utara adalah kabupaten Jepara dan laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kudus dan kabupate Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan kabupaten Blora, sedangkan timur berbatasan dengan kabupaten Rembang dan laut Jawa.

Wilayah administrasi kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan dengan 7 diantaranya adalah kecamatan di daerah pesisir, yaitu Kec. Trangkil, Kec. Margoyoso, Kec. Tayu, Kec. Dukuhsekti, Kec. Juwana, Kec. Batangan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di kabupaten Pati yang beroperasi dari tahun ketahun, dimana potensi perikanan dan kelautan telah dimanfaatkan untuk berbagai

³Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :RinekeCipta, 2000), hlm. 15.



macam kegiatan pembangunan. Dalam pembangunan nasional sector perikanan sangat berperan penting karena menghasilkan bahan pangan protein hewani yang besar bagi masyarakat mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri melalui penyediaan bahan baku menghasilkan devisa melalui ekspor hasil perikanan serta peningkatan pendapatan nelayan, produksi perikanan tersebut seharusnya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan terletak di desa Pecangaan kecamatan Batangan kabupaten Pati. Secara astronomis kecamatan Batangan memiliki luas wilayah 5.066 Ha dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kaliori kabupaten Rembang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jaken
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Juwana
5. Di bagian timur dibatasi oleh sungai Randugunting yang membelah kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang.

Memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka dalam rangka optimalisasi produksi perikanan laut serta upaya penangkapan ikan, pemerintah kabupaten pati mengambil berbagai kebijakan perikanan tangkap antara lain:

1. melakukan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan;
2. melakukan program modernisasi penangkapan ikan, sehingga nelayan dapat menangkap ikan pada jalur yang lebih jauh;
3. melakukan program peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan pantai yang memadai;
4. melakukan penyuluhan tentang peluang dan tantangan ekspor komoditas hasil perikanan;
5. melakukan program penataan lingkungan, sehingga produktivitas sumber daya iakn dapat ditingkatkan;
6. melakukan program kerjasama antar daerah, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan dalam usaha penangkapan ikan dan mengatasi konflik yang ditimbulkan akibat salah interpretasi terhadap peraturan;
7. mendorong adanya penelitian geofisika, kimia, biota, teknologi, dan sosio-kultural;
8. menciptakan lapangan kerja dilura peerikanan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan;
9. melakukan program untuk mengatasi masalah



- permodalan yang dihadapi oleh pelaku usaha sektor perikanan;
10. melakukan program pengembangan sistem informasi menejemen perikanan; dan membuat rencana terpadu pengembangan wilayah.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati

Pembangunan dan penyediaan fasilitas prasarana perikanan dalam hal ini Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah. Direktorat Jendral Perikanan dalam menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 41 yang isinya sebagai berikut :

1. Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan
2. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan :
 - a. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;

- b. Klasifikasi pelabuhan perikanan;
 - c. Pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. Persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - e. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - f. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
3. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
 4. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap kapal dan/atau kapal pengangkut ikan yang tiak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrative berupa



peringatan, pembekuan ijin, atau pencabutan ijin.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan perikanan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Usaha Pemerintahan Kabupaten Pati yaitu:

1. Bidang Kelautan
2. Bidang Umum
3. Bidang Perikanan Tangkap
4. Bidang Perikanan Budidaya

C. Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan

Sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun dalam usaha perikanan :

1. Fasilitas pokok
Fasilitas pokok merupakan fasilitas utama dalam suatu pelabuhan perikanan yang sangat menunjang kebutuhan operasional pelabuhan dan juga merupakan fasilitas yang diperlukan kapal untuk berlayar keluar masuk pelabuhan secara aman dan merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan.

a. Dermaga (*Quay*)

Dermaga adalah fasilitas pelabuhan yang mempunyai fungsi sangat kompleks sehingga dalam desain aspek-aspek yang lebih luas harus diperhatikan. Pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan ini memiliki panjang dermaga dengan luas 97 m² dengan luas dermaga kayu sebesar 190 m² dan dengan luas lahan adalah 1 hektar. Kondisi dermaga di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan bisa dikatakan baik dan berfungsi dengan optimal. Mampu menampung jumlah kapal sekurang-kurangnya 60 GT dengan daya tamping kapal kurang lebih 15 unit kapal perikanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2006.

b. Alur pelayaran

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayani oleh kapal di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur pelayaran digunakan untuk



mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan, oleh karena itu harus melalui perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan batangan diperoleh data yang berkaitan dengan alur pelayaran sebagai berikut :

Kedalaman alur : 7 meter

Lebar alur : 40 meter

2. Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna dari nilai fasilitas dasar, tanpa adanya fasilitas fungsional kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar muat, reparasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil tangkapan dan lain-lain tidak dapat berjalan dengan baik.

a. Gedung TPI

Kantor gedung administrasi pelabuhan memiliki luas 81 m². Fungsi dari kantor administrasi pelabuhan adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama adalah masyarakat nelayan. Selain itu fungsi dari kantor administrasi adalah tempat rapat bagi para pegawai. Sedangkan gedung TPI mempunyai luas 194 m² yang digunakan untuk tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan.

b. Instalasi listrik

Instalasi listrik yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan adalah sebanyak 1 unit dengan daya sebesar 900 Watt.

c. Menara air

Menara air yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan berasal dari sumur artesis yang dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke atas menara air dan di alirkan ke kantor-kantor.

d. Air bersih

Fasilitas air bersih yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan terdiri dari PDAM dan artesis pada menara air. Fungsi dari adanya fasilitas air bersih adalah untuk memberikan pelayanan berupa air bersih kepada nelayan yang akan melaut.

3. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang adalah sarana yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum.

a. Area parker

Tempat parker yang dimiliki oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) batangan seluas 100 m².

b. MCK

MCK yang dimiliki oleh Pangkalan Pendaratan Ikan



(PPI) Batangan adalah 1 unit dan dalam keadaan baik, selalu dibersihkan oleh penjaga sehingga tidak berbau menyengat.

- c. Jalan masuk kawasan'
Jalan masuk kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan terbilang baik karena sudah diaspal dan tidak berlubang sehingga akses menuju ke PPI Batangan sangat nyaman.
- d. Mushola
Mushola di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan terbilang agak jauh dari gedung PPI. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan memiliki 1 unit mushola sebagai tempat ibadah dengan luas kurang lebih 42 m².

IV. KESIMPULAN

1. Pemerintahan
Kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan utama dalam perekonomian di Kabupaten Pati, serta dapat membawa perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan daerah serta kewenangan

pengelolaan sumber daya yang terwujud dalam kebijakan sektoral termasuk sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati pada hakekatnya merupakan wujud kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pati yang mulai berupaya memajukan daerahnya melalui pengelolaan potensi maritime yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

2. Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun dalam usaha perikanan telah mencukupi standar operasional. Namun pemerintah Kabupaten Pati masih terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan pengolahan perikanan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan



perekonomian
masyarakat sekitar.

Perubahan Atas Undang-
Undang No.31 Tahun 2004
Tentang Perikanan

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :RinekeCipta, 2000.

Bagirmanan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang :Uniska Karawang,1993.

Bambang Murdyanto, *Pelabuhan Perikanan*, Bogor :Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2004.

HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

KartiniKartono, *PengantarMetode Research*, Bandung :Alumni, 1976.

Lubis, E. *Pengantar Pelabuhan Perikanan, Laboratorium Pelabuhan Perikanan*, Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2000.

Masalah-Masalah Hukum, (Semarang :Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.34 No.4 Oktober – Desember 2005: 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Pati.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati